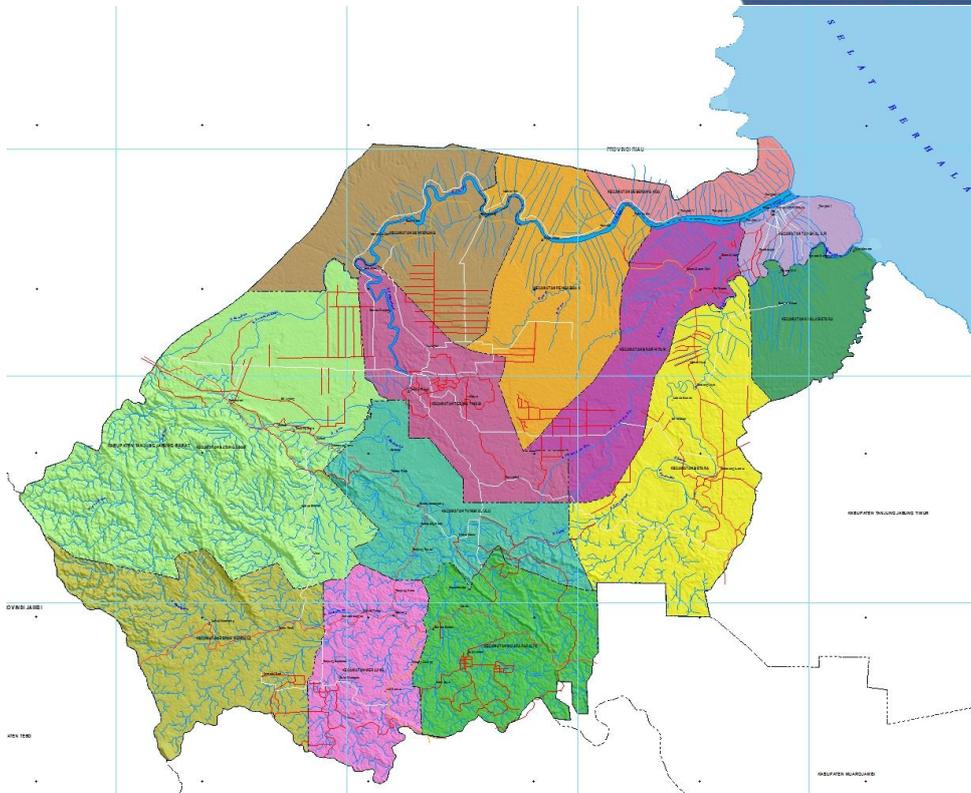


# LAKIP TRIWULAN I TAHUN 2017



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512  
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : [disbunnaktanjabbarat@yahoo.com](mailto:disbunnaktanjabbarat@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

LAKIP Triwulan I Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ini adalah penjabaran KINERJA dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

LAKIP Triwulan I adalah gambaran Kinerja **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang telah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode Januari - Maret (Triwulan I) tahun 2017.

Tersusunnya LAKIP ini diharapkan akan terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan program/kegiatanm sesuai perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan** Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.



Kuala Tungkal, 3 April 2017

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung jabung Barat

  
**Ir. Melan Bangun**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611215 199303 1 003

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Maksud dan Tujuan	3
1.3    Landasan Hukum	7
1.4    Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	9
<b>BAB II     Perencanaan Kinerja</b>	
2.1    Rencana Strategis	11
2.2    Rencana Kinerja Tahun 2017	22
2.3    Perjanjian Kinerja Tahun 2017	22
<b>BAB III    Akuntabilitas Kinerja</b>	40
3.1    Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2    Akuntabilitas Anggaran ( Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)	51
<b>BAB IV    Penutup</b>	53
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "*good governance*" adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya (*performance-nya*) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-

2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat 2016, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan selama tahun 2017 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Bidang Peternakan.</u></b>					
Persentase pertumbuhan dan populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 2 % per tahun	a. SDM petugas peternak b. Masih tingginya kematian ternak c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya ketersediaan obat hewan	a. Banyaknya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Pencurian ternak masih banyak d. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak c. Regulasi /Tata Ruang bidang peternakan d. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis e. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal.
<b><u>Bidang Perkebunan.</u></b>					
Produksi Hasil Perkebunan	Produksi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Persentase pertumbuhan Produksi Perkebunan	a. SDM Petugas Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan	a. Pengetahuan petani yg masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b. Kurangnya penggunaan IPTEK.	a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani b. Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan
Mutu Produk			Ketersediaan	a. Masih tingginya	Pengetahuan

hasil perkebunan			teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan	serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan. b. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan c. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah	SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan
------------------	--	--	--	--	---

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2017 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan , sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

## 1.2 MAKSUD dan TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LAKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan selama tahun 2016 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LAKIP ini.

Dalam LKIP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan pada tahun 2017, yang diselenggarakan melalui 4 (empat) program pokok dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan pokok, serta 7 (tujuh) program penunjang dengan 19 (sembilan belas) kegiatan penunjang, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD.

### **1.3 DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
- 22) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 24) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
- 25) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

#### **1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS (2016-2021).**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2016, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021 tersebut, adalah sebagai berikut:

### 2.1.1 VISI dan MISI.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan sistem Bioindustri yang berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta melihat potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat , maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi Pembangunan** adalah :

**“ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKULAITAS  
MENUJU KETESEEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN  
PETANI”**

**Mengandung Makna** bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan *produksi, pengolahan , distribusi* kegiatan *On Farm* dan *Off Farm* dalam suatu **Sistim Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Ungulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan **Visi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021** tersebut, maka ditetapkan **3 Misi** yang diemban **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode	MISI
M.1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Petani dan Peternak serta kesejahteraan masyarakat.
M.2	Memanfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi.
M.3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

## 2.1.2 TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas ditetapkanlah **Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode	Tujuan Strategis (TS)
T.1	Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Ternak.
T.2	Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan mutu hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK.
T.3	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan.
T.4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yg menggambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yg akan dicapai pada masa mendatang (Tahun 2021). **Sasaran Strategis (SS)** untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T.1)**, “Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Peternakan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Tujuan Strategis 1 (T.1)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :	
		Daging Sapi	378.567 kg
		Daging Kerbau	13.903 kg
		Daging Kambing	60.469 kg
		Daging Domba	608 kg
		Daging Unggas	2.524.952 kg
		Kelahiran Ternak Sapi IB	14.000 Ekor
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :	
		Sapi	8.096 ekor
		Kerbau	646 ekor
		Kambing	40.435 ekor
		Domba	670 ekor
		Unggas	1.335.957 ekor
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :	
		Sawit	147.790 ton
		Karet	15.863 ton
		Kelapa	61.635 ton
		Kopi	1.367 ton
		Pinang	12.375 ton

2. **Tujuan Strategis 2 (T.2),**” Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

**Tabel 2.4** Tujuan Strategis 2 (T.2)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Menurunnya Angka Kematian Ternak.	Persentase Kematian Ternak minimal 1.5 %
SS5	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK	Pengembangan Agrobisnis Sektor Perkebunan : 1 sentra agrobisnis
		Penerapan IPTEK Budidaya dan Pascapanen tanaman perkebunan : 6 kelompok tani
		Tersedianya Blok Penghasil Tinggi : 3 Komiditi

3. **Tujuan Strategis 3 (T.3),**”Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** :

**Tabel 2.5** Tujuan Strategis 3 (T.3)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :	
		Luas Lahan Sawit	56.294 Ha
		Luas Lahan Karet	15.806 Ha
		Luas Lahan Kelapa	56.294 Ha
		Luas Lahan Kopi	3.310 Ha
		Luas Lahan Pinang	11.800 Ha
SS7	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan.	Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE): 60 kelompok Tani	
		Penguatan Kelembagaan kelompok Petani : 30 Asosiasi	
		Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan : 6.000 STD-B Agrobisnis.	
		Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan : 9 kelompok	

4. **Tujuan Strategis 4 (T.4),**” Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan ”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

**Tabel 2.6** Tujuan Strategis 4 (T.4)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	Terbangunnya Jalan Produksi Perkebunan : 40 km Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen : 36 Kelompok

### 2.1.3 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

#### **S t r a t e g i**

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui *Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)*, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.

5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui *Rumah Kompos, Biogas* dan lain lain.
6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan Sentra Perkebunan dan Peternakan.
7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

### **K e b i j a k a n.**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. *Kebijakan Umum* Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.
2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

## 2.1.4 PROGRAM dan KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017 adalah 14 Program dan 47 Kegiatan ( 10 Program Pokok dan 31 Kegiatan Pokok serta 4 Program Penunjang dan 16 Kegiatan Penunjang) sebagaimana berikut :

### Urusan Pilihan

No.	Uraian
1	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
11	Pengadaan peralatan gedung kantor
12	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
16	Pengembangan SDM

Urusan Pertanian

No.	Uraian
5	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>
17	Promosi atas hasil produksi perkebunan
6	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>
18	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan
7	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>
19	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)
20	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom
21	Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat
22	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom
23	Pembibitan Kelapa Sawit
24	Prevensi, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan
25	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida
26	Pembinaan Lintas Sektoral
27	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman
28	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan
29	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres
8	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>
30	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan
9	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>
31	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
32	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
33	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Peralatan Medis
10	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>
34	Pengembangan agribisnis peternakan
35	Pengembangan Inseminasi Buatan
36	Sinkronisasi Birahi
37	Penyangga Hari Besar Keagamaan
38	Pusat Pengembangan Itik Daerah
11	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>
39	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)
12	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b>
40	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan
41	Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)
42	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya

13	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan</b>
43	Pengolahan Data Statistik Perkebunan
44	Penyebaran Informasi Perkebunan
45	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan
<hr/>	
14	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan</b>
46	Pengelolaan Ternak Pemerintah
47	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan
<hr/>	

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan**, dapat dilihat pada **Tabel 2.7** berikut ini:

**Tabel 2.7**

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

<b>VISI : “ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKUALITAS MENUJU KETESEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI ”</b>			
<b>MISI I: “Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat”.</b>			
<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan populasi dan produksi Komoditi Perkebunan dan peternakan (T.1)	Meningkatnya produksi daging ternak (SS1)	1. Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan produksi peternakan.
	Meningkat nya populasi ternak (SS2)		
	Meningkatnya Produksi Komiditi Perkebunan (SS3)	1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman.	
<b>MISI II: “Memanfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi”.</b>			
<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK (T.2)	Menurunnya angka kematian ternak (SS4)	Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit menular strategis (PHMS).	Peningkatan pelayanan keswan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK (SS5)	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Terapan pada pelaksanaan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pasca Panen bagi Petani Perorangan/Kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi teknis yg lebih intens untuk petani perorangan/kelompok melalui tenaga PPL.</li> <li>2. Memberi bantuan hibah langsung kepada masyarakat berupa bibit unggul, Pupuk, alat pengolahan pascapanen.</li> <li>3. Membangun dan memelihara sarana pendukung dan penunjang perkebunan.</li> </ol>
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan (T.3)	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS6)	Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan</li> <li>(2) Pendampingan oleh tenaga teknis lapangan</li> </ol>
	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan (SS7)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelatihan secara berkesinambungan bagi petani dalam pengolahan lahan sebelum masa tanam dan pasca panen</li> <li>(2) Pendampingan secara berkala dan terstruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi petani</li> <li>(2) Memberdsayakan PPL dalam pendampingan bagi petani</li> </ol>
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan (T.4)	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Perkebunan (SS8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan penggunaan TTG</li> <li>(2) Budidaya penggunaan IPTEK untuk pengolahan pasca panen</li> <li>(3) Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan Produksi komoditi perkebunan dan ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengadakan bantuan bibit tanaman unggul dan ternak unggul bagi petani</li> <li>(2) Mengadakan bantuan sarana penunjang pengolahan dan pasca panen bagi petani</li> <li>(3) Mengadakan vaksin dan obata-obatan bagi peternak.</li> <li>(4) Pembangunan dan Rehabilitasi/Perbaikan Jalan Produksi</li> </ol>

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.7 tersebut di atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2017 sendiri adalah terdiri dari 14 outcome dan 47 output dengan anggaran sebesar **Rp. 5,695,784,842.00** sebagaimana dijelaskan pada Bab berikutnya.

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

### **2.3.1 PERJANJIAN KINERJA UTAMA**

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2017 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 4 (Empat) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8. berikut ini:

**Tabel 2.8**

**IKU Tahun 2017 Dinas Perkebunan dan Peternakan**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>	<b>Target</b>
<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.</b>	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :	
		1.Sawit	136.535
		2.Karet	14.655
		3.Kelapa	56.941
		4.Kopi	1.263
		5.Pinang	11.432
<b>SS6</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif</b>	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :	
		1.Luas Lahan Sawit	63.833
		2.Luas Lahan Karet	15.006
		3.Luas Lahan Kelapa	55.183
		4.Luas Lahan Kopi	3.119
		5.Luas Lahan Pinang	10.484
<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>	<b>Target</b>
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Produksi Daging Ternak.</b>	Produksi Daging Ternak (kg) :	
		1.Daging Sapi	349.737
		2.Daging Kerbau	12.844
		3.Daging Kambing	55.846
		4.Daging Domba	562
		5.Daging Unggas	2.331.966
		6.Kelahiran Ternak Sapi IB	1.100
<b>SS2</b>	<b>Meningkatnya Populasi Ternak</b>	Populasi Ternak (ekor) :	
		1.Sapi	7.482
		2.Kerbau	619
		3.Kambing	40.275
		4.Domba	646
		5.Unggas	1.099.095

### **2.3.2 PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (Outcome) dan Kegiatan (Output).**

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kegiatan yg disepakati antara Kepala Bidang Es. III dan Kepala seksi/Kasubbag Es.IV

Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017*.

Adapun untuk tahun 2017 ini Perjanjian Kinerja Program yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2017**

Urusan Pilihan

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Penanggung Jawab
Prog	Keg				
01		<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	meningkatnya intensitas dan kualitas pelayanan administrasi		Sekretaris
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honorarium jasa adm keuangan	12 bulan	
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya atk kantor	12 bulan	
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya baran cetak dan penggandaan	12 bulan	
	13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen intalasi listrik	12 bulan	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum	12 bulan	
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	

*Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I*

02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan administrasi		Sekretaris
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	
22	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan operasional	59 Unit	
26	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	55 Unit	
32	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	5 Unit	
03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur		Sekretaris
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	91 stel	
05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS		Sekretaris
05	Pengembangan SDM	jumlah PNS yg mengikuti pelatihan/diklat	5 orang	

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I

Urusan Pertanian

Kode		Uraian	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Penanggung Jawab
Prog	Keg				
17		<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	tersedianya sentra agrobisnis produk unggulan perkebunan		Bidang Penyuluh
	18	Promosi atas hasil produksi perkebunan	terlaksananya publikasi dan promosi produk unggulan daerah	4 kali	Kasi Pemasaran
18		<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	kelompok tani yg menerapkan teknologi pertanian		Bidang Sarana prasarana
	45	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana perkebunan	100 kodi seng, 3 mesin pengolah kopi basah, 3 mesin pengolah kopi kering, 1 unit biogas	Kasi Pupuk, Pestisida, alat dan Mesin.
19		<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	meningkatnya produksi 5 komoditi unggulan: kopi,karet,sawit,pinang,kelapa dalam		Bidang Perkebunan
	30	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	luas lahan terairi TAM	100 Ha	Kasi Lahan & Irigasi
	31	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom	terpeliharanya kebun percontohan kopi LIBTUKOM	12 bulan	Kasi Produksi
	32	Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	intensifikasi lahan kopi rakyat	50 Ha	Kasi Perlindungan
	33	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom	terpeliharanya BPT kelapa,pinang dan kopi libtukom	228.5 Ha Kelapa (3717 PIK),7 Ha Pinang (250 PIP),22 Ha Kopi (775 PIK)	Kasi Perbenihan
	34	Pembibitan Kelapa Sawit	tersedianya bibit kelapa sawit yg bermutu	10.000 bibit	Kasi Penyuluhan

*Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I*

35	Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	terlaksananya pencegahan dan pengendalian karhutla dan konflik lahan	13 Kec	Kasi Perlindungan
36	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida	terlaksananya pembinaan, pengawasan pupuk dan pestisida	13 Kec	Kasi Pupuk, Pestisida, alat dan Mesin.
37	Pembinaan Lintas Sektoral	pengadaan bantuan lintas sektoral	50 org, 1 paket, 1 paket	Kasi Pengolahan
38	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	100 Ha	Kasubbag TU UPTD Lab.hayati
39	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	30 kali	Kasi Perlindungan
41	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres	9 Ha	Kasi Produksi
20	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap penyuluh		Bidang Penyuluh
28	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	terlaksananya koordinasi penyuluh perkebunan/peternakan	12 kali	Kasi Penyuluhan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I

21	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	menurunnya angka kematian ternak		Bidang Peternakan
02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yg terlayani pengobatan,PKB,permeriksaan spesimen,vaksinasi,eliminasi	1000 ekor,1000 ekor,2000 ekor,1 paket, 2500 ekor, 100 ekor	Kasi Keswan & Kesmavet
04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	terlaksananya pengawasan perdagangan ternak dan pemotongan	12 bulan	Kasi Keswan & Kesmavet
07	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak,Vaksin dan Peralatan Medis	tersedianya obat-obatan ternak dan peralatan medis veteriner	1 paket	Kasi Keswan & Kesmavet
22	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak:sapi,kerbau,kambing,domba,babi,ayam broiler,ayam buras,itik		Bidang Peternakan
08	Pengembangan agribisnis peternakan	terlaksananya pelatihan arbisnis peternakan	1 kali	Kasi Pengembangan & Penyebaran
13	Pengembangan Inseminasi Buatan	jumlah sapi IB	1500 ekor	Kasi Pembibitan & Produksi
15	Sinkronisasi Birahi	jumlah sapi IB	1000 ekor	Kasi Pembibitan & Produksi
22	Penyangga Hari Besar Keagamaan	tersedianya daging untuk konsumsi hari besar keagamaan	6 ekor	Kasi Pengembangan & Penyebaran
28	Pusat Pengembangan Itik Daerah	pengadaan bibit itik indukan	300 ekor	Kasi Pembibitan & Produksi
24	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>	jumlah kelompok peternak yg menerapkan teknologi peternakan		Bidang Sarana prasarana
11	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	terlaksananya pelatihan TTG	2 kali	Kasi Lahan & Irigasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I

25	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b>	meningkatnya kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan		Bidang Sarana prasarana dan Bidang Penyuluh
01	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	terbinanya asosiasi dan terjalannya kerjasama kemitraan	5 asosiasi	Kasi Perbenihan
02	Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	terlaksananya pelatihan SKE	125 org	Kasi Pengolahan
03	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	diperolehnya STD-B untuk kebun sawit swadaya	2 Kec	Kasi Pembiayaan & Investasi
29	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan</b>	tersedianya data perkebunan yg valid dan up to date		Sekretaris dan Bidang Penyuluh
01	Pengolahan Data Statistik Perkebunan	tersedianya data statistik perkebunan	10 dok	Kasubbag PPEP
02	Penyebaran Informasi Perkebunan	tersediannya dokumen informasi pasar	12 kali	Kasi Pemasaran
03	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan	tersedianya RENJA,RKA,DPA,TAPKIN dan LAKIP	4 dok	Kasubbag PPEP
30	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan</b>	tersedianya data peternakan yg valid dan up to date		Bidang Peternakan
01	Pengelolaan Ternak Pemerintah	terkelolanya pusat ternak daerah	64 kelompok	Kasi Pengembangan & Penyebaran
02	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan	tersediannya dokumen informasi pasar	12 bulan	Kasi Pemasaran

## 2.4 PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017

Pagu Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 22/KEP.BUP/KEU/2017 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat tanggal 03 Januari 2017.

Tabel 2.11

### PAGU ANGGARAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Urusan Pilihan

No.	Uraian	Total Anggaran (Rp.)
<b>1</b>	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,400,000.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	192,800,000.00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,700,000.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,737,067.00
5	Penyediaan alat tulis kantor	76,147,050.00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,250,000.00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16,662,800.00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	19,440,000.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180,000,000.00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	6,000,000.00
12	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	403,500,000.00
13	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	26,750,000.00
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	135,000,000.00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28,875,000.00
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
16	Pengembangan SDM	25,000,000.00

Urusan Pertanian

No.	Uraian	Total Anggaran (Rp.)
5	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	
17	Promosi atas hasil produksi perkebunan	118,040,000.00
6	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	
18	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	356,660,000.00
7	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	
19	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	118,200,000.00
20	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom	61,600,000.00
21	Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	144,600,000.00
22	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom	124,947,800.00
23	Pembibitan Kelapa Sawit	335,000,000.00
24	Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	152,591,000.00
25	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida	40,325,000.00
26	Pembinaan Lintas Sektoral	88,980,600.00
27	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	119,595,000.00
28	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	87,310,000.00
29	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	125,000,000.00
8	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	
30	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	154,310,000.00

9	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	
31	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	265,800,000.00
32	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	86,350,000.00
33	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Peralatan Medis	209,999,975.00
10	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	
34	Pengembangan agribisnis peternakan	75,870,000.00
35	Pengembangan Inseminasi Buatan	230,800,000.00
36	Sinkronisasi Birahi	245,100,000.00
37	Penyangga Hari Besar Keagamaan	137,100,000.00
38	Pusat Pengembangan Itik Daerah	143,400,000.00
11	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>	
39	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	67,409,000.00
12	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b>	
40	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	60,000,000.00
41	Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	95,174,550.00
42	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	158,215,000.00
13	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan</b>	
43	Pengolahan Data Statistik Perkebunan	146,630,000.00
44	Penyebaran Informasi Perkebunan	90,625,000.00
45	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan	104,515,000.00
14	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan</b>	
46	Pengelolaan Ternak Pemerintah	147,800,000.00
47	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan	144,575,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,695,784,842.00</b>

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi) maupun data eksternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

### **3.1.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Tanjab Barat dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

Persentase Pencapaian Rencana	=	$\frac{\text{Realisasi Tahun } ^t}{\text{Target Rencana Tahun } ^t}$	x 100
----------------------------------	---	--	-------

Rumus 2:

Persentase Peningkatan/Penurunan capaian Kinerja	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } ^t - \text{Realisasi Thn } ^{t-1}}{\text{Realisasi Tahun } ^{t-1}}$	x 100
--	---	--	-------

Rumus 3:

Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } ^t}{\text{Realisasi Tahun } ^{t-1}}$	x 100
---	---	---	-------

Rumus 4:

Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah	=	$\frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } ^t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } ^n}$	x 100
--	---	--	-------

Rumus 5:

Persentase Perbandingan dengan Nasional	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } ^t}{\text{Realisasi Nasional Thn } ^t}$	x 100
---	---	--	-------

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Nilai diatas 100% dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan baik (B)
- 3) Nilai diatas 55% s/d 80% dengan sebutan cukup (C)
- 4) Nilai dibawah 55% dengan sebutan kurang (K)

### **3.1.2 PERBANDINGAN TARGET dan REALISASI INDIKATOR KINERJA**

#### **a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET dan REALISASI KINERJA TAHUN 2017.**

Target Kinerja 2017 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Tanjab Barat, selama kurun waktu Triwulan I (Januari-Maret 2017) telah dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini:

## Realisasi Capaian Kinerja Utama Triwulan I Terhadap Penetapan Kinerja

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2017	Realisasi s/d Maret 2017	Capaian thd PK
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :			
		1.Sawit	136.535	37.391	27,38%
		2.Karet	14.655	1.767	12,05%
		3.Kelapa	56.941	14.889	26,14%
		4.Kopi	1.263	308	24,38%
		5.Pinang	11.432	2.921	25,55%
<b>Rata-rata Capaian SS3</b>					<b>23,10%</b>
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :			
		1.Luas Lahan Sawit	63.833	64.052	100,34%
		2.Luas Lahan Karet	15.006	13.682	91,17%
		3.Luas Lahan Kelapa	55.183	54.727	99,17%
		4.Luas Lahan Kopi	3.119	2.590	83,03%
		5.Luas Lahan Pinang	10.484	10.554	100,66%
<b>Rata-rata Capaian SS6</b>					<b>94,87%</b>
Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :			
		1.Daging Sapi	349.737	28.804	8,23%
		2.Daging Kerbau	12.844	1.481	11,53%
		3.Daging Kambing	55.846	6.182	11,06%
		4.Daging Domba	562	154	27,40%
		5.Daging Unggas	2.331.966	222.714	9,55%
		6.Kelahiran Ternak Sapi IB	1.100	227	20,63%
<b>Rata-rata Capaian SS1</b>					<b>14,73%</b>
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :			
		1.Sapi	7.482	8.634	115,39%
		2.Kerbau	619	698	112,76%
		3.Kambing	40.275	44.267	109,91%
		4.Domba	646	766	118,57%
		5.Unggas	1.099.095	1.431.234	130,21%
<b>Rata-rata Capaian SS2</b>					<b>117,36%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk **sasaran SS1** yaitu *Meningkatnya Produksi Daging Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Produksi Daging Ternak (kg) rata-rata komoditas ternak, pada tahun 2017 (triwulan I) mencapai target kinerja sebesar **14,73%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi daging ternak secara kualitatif dan kuantitatif masih perlu ditingkatkan untuk triwulan berikutnya.
2. Untuk **sasaran SS2** yaitu *Meningkatnya Populasi Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Jumlah Populasi Ternak pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja rata-rata sebesar 117,36%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak, secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan mampu melampaui target kinerjanya.
3. Untuk **sasaran SS3** yaitu *Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan*, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja sebesar 23,10%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan masih jauh dari target yg telah ditentukan, perlu peningkatan secara optimal untuk triwulan berikutnya.
4. Untuk **Sasaran SS4** yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Produktif*, dengan indikator 1 yaitu meningkatnya luas lahan produktif yg dikelola oleh masyarakat realisasi rata-rata sebesar 117,36%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan pengelolaan lahan produktif secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan dianggap Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.

Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2017 (Triwulan I) tersebut diatas, secara keseluruhan masih diperlukan adanya pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja secara optimal.

**b. PERBANDINGAN ANTARA TARGET dan REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TOTAL RENSTRA 2016-2021.**

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan ( Januari s/d Maret 2017) terhadap total target Renstra di tahun 2021 :

## Realisasi Capaian Kinerja Utama Triwulan I Terhadap Target Renstra 2021

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2021	Realisasi s/d Maret 2017	Capaian thd Target Renstra 2021
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :			
		1.Sawit	147.790	37.391	25,30%
		2.Karet	15.863	1.767	11,13%
		3.Kelapa	61.635	14.889	24,15%
		4.Kopi	1.367	308	22,53%
		5.Pinang	12.375	2.921	23,60%
<b>Rata-Rata Capaian SS3</b>					<b>21,34%</b>
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :			
		1.Luas Lahan Sawit	67.750	64.052	94,54%
		2.Luas Lahan Karet	15.806	13.682	86,56%
		3.Luas Lahan Kelapa	56.294	54.727	97,21%
		4.Luas Lahan Kopi	3.310	2.590	78,24%
		5.Luas Lahan Pinang	11.800	10.554	89,44%
<b>Rata-Rata Capaian SS6</b>					<b>89,19%</b>
Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :			
		1.Daging Sapi	378.567	28.804	7,60%
		2.Daging Kerbau	13.903	1.481	10,65%
		3.Daging Kambing	60.469	6.182	10,22%
		4.Daging Domba	608	154	25,32%
		5.Daging Unggas	2.524.952	222.714	8,82%
		6.Kelahiran Ternak Sapi IB	14.000	227	1,62%
<b>Rata-Rata Capaian SS1</b>					<b>10,70%</b>
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :			
		1.Sapi	8.096	8.634	106,64%
		2.Kerbau	646	698	108,04%
		3.Kambing	40.435	44.267	109,47%
		4.Domba	670	766	114,32%
		5.Unggas	1.335.957	1.431.234	107,13%
<b>Rata-Rata Capaian SS1</b>					<b>109,12%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU yang disajikan pada tabel tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil kerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk **sasaran SS1** yaitu *Meningkatnya Produksi Daging Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Produksi Daging Ternak (kg) rata-rata komoditas ternak, pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja sebesar **10,70%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi daging ternak sampai tahun 2021 secara kualitatif dan kuantitatif optimis masih akan tercapai secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
2. Untuk **sasaran SS2** yaitu *Meningkatnya Populasi Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Jumlah Populasi Ternak pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja rata-rata sebesar 109,12%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak, secara kualitatif dan kuantitatif optimis melampaui target kerjanya sampai 2021.
3. Untuk **sasaran SS3** yaitu *Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan*, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja sebesar 21,34%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas perkebunan secara kualitatif dan kuantitatif optimis tercapai sampai 2021.
4. Untuk **Sasaran SS4** yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Produktif*, dengan indikator 1 yaitu meningkatnya luas lahan produktif yg dikelola oleh masyarakat realisasi rata-rata sebesar 89,19%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan pengelolaan lahan produktif secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.

Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2017 (Triwulan I) tersebut diatas, secara keseluruhan masih diperlukan adanya pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja secara optimal.

### **3.1.3 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**

4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Dalam pencapaian Indikator yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produksi beberapa komoditas srategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman.
2. Dalam pencapaian indikator yaitu luas pengelolaan lahan perkebunan, terdapat kendala berupa tingginya penyusutan lahan perkebunan akibat adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah membuat peraturan yang lebih ketat terhadap gejala alih fungsi lahan, serta mendorong petani untuk tidak.
3. Untuk indicator bidang peternakan bahwa secara keseluruhan sudah baik dalam mencapai target dan sasaran kinerja

### 3.1.4 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengaturan/penataan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan perkebunan;
- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta pendukung prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan, serta pengolahan produk perkebunan.

### **3.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN (ANGGARAN dan REALISASI BELANJA DAERAH)**

Dari segi pemanfaatan anggaran pembangunan pada tahun 2017 Triwulan I (Januari-Maret) adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**REALISASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2017**

**Triwulan I ( Januari - Maret 2017 )**

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	(%)	
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>5,695,784,842.00</b>	494,754,014.00	8.69	8.69
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,259,261,917.00</b>	<b>80,468,114.00</b>	6.39	6.39
<b>1</b>	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>634,136,917.00</b>	<b>77,468,114.00</b>	16.17	16.17
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,400,000.00	540,000.00	10.00	10.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	192,800,000.00	14,450,490.00	7.50	7.50
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,700,000.00	19,050,000.00	18.92	18.92
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,737,067.00	7,129,134.00	36.12	36.12
5	Penyediaan alat tulis kantor	76,147,050.00	6,540,800.00	8.59	8.59
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,250,000.00	2,675,000.00	15.51	15.51
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16,662,800.00	6,560,400.00	39.37	39.37
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000.00	500,000.00	8.33	8.33
9	Penyediaan makanan dan minuman	19,440,000.00	1,350,000.00	6.94	6.94
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180,000,000.00	18,672,290.00	10.37	10.37
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>571,250,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	6,000,000.00	-	0.00	-
12	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	403,500,000.00	3,000,000.00	0.74	0.74
13	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	26,750,000.00	-	0.00	-
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	135,000,000.00	-	0.00	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I

3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>28,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28,875,000.00	-	0.00	
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
16	Pengembangan SDM	25,000,000.00	-	0.00	
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>4,436,522,925.00</b>	<b>414,285,900.00</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>
5	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>118,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
17	Promosi atas hasil produksi perkebunan	118,040,000.00	-	0.00	-
6	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	<b>356,660,000.00</b>	<b>19,540,000.00</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>
18	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	356,660,000.00	19,540,000.00	5.48	5.48
7	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>1,398,149,400.00</b>	<b>115,363,500.00</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>
19	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	118,200,000.00	9,845,000.00	8.33	8.33
20	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom	61,600,000.00	12,135,000.00	19.70	19.70
21	Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	144,600,000.00	14,492,000.00	10.02	10.02
22	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom	124,947,800.00	12,342,500.00	9.88	9.88
23	Pembibitan Kelapa Sawit	335,000,000.00	13,055,000.00	3.90	3.90

*Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I*

24	Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	152,591,000.00	-	0.00	-
25	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida	40,325,000.00	12,575,000.00	31.18	31.18
26	Pembinaan Lintas Sektoral	88,980,600.00	-	0.00	-
27	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	119,595,000.00	19,915,000.00	16.65	16.65
28	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	87,310,000.00	14,780,000.00	16.93	16.93
29	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	125,000,000.00	6,224,000.00	4.98	4.98
<b>8</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>154,310,000.00</b>	<b>35,505,000.00</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>
30	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	154,310,000.00	35,505,000.00	23.01	23.01
<b>9</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>562,149,975.00</b>	<b>55,990,000.00</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>
31	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	265,800,000.00	41,585,000.00	15.65	15.65
32	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	86,350,000.00	14,405,000.00	16.68	16.68
33	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Peralatan Medis	209,999,975.00	-	0.00	-
<b>10</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>832,270,000.00</b>	<b>51,075,000.00</b>	<b>6.14</b>	<b>6.14</b>
34	Pengembangan agribisnis peternakan	75,870,000.00	-	0.00	-
35	Pengembangan Inseminasi Buatan	230,800,000.00	36,495,000.00	15.81	15.81
36	Sinkronisasi Birahi	245,100,000.00	6,030,000.00	2.46	2.46
37	Penyangga Hari Besar Keagamaan	137,100,000.00	-	0.00	-
38	Pusat Pengembangan Itik Daerah	143,400,000.00	8,550,000.00	5.96	5.96

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 Triwulan I

11	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>	<b>67,409,000.00</b>	-	0.00	-
11	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	67,409,000.00	-	0.00	-
12	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b>	<b>313,389,550.00</b>	<b>31,346,150.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
39	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	60,000,000.00	-	0.00	-
40	Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	95,174,550.00	10,581,150.00	11.12	11.12
41	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	158,215,000.00	20,765,000.00	13.12	13.12
13	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan</b>	<b>341,770,000.00</b>	<b>43,911,250.00</b>	<b>12.85</b>	<b>12.85</b>
42	Pengolahan Data Statistik Perkebunan	146,630,000.00	12,000,000.00	8.18	8.18
43	Penyebaran Informasi Perkebunan	90,625,000.00	17,436,250.00	19.24	19.24
44	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan	104,515,000.00	14,475,000.00	13.85	13.85
14	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan</b>	<b>292,375,000.00</b>	<b>61,555,000.00</b>	<b>21.05</b>	<b>21.05</b>
45	Pengelolaan Ternak Pemerintah	147,800,000.00	30,115,000.00	20.38	20.38
46	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan	144,575,000.00	31,440,000.00	21.75	21.75

Berdasarkan Data Realisasi Keuangan dan Fisik untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 pada **Triwulan I** Rata-rata Realisasi keuangan dan fisik sebesar **8,69%** (*delapan koma enam puluh Sembilan persen*). Kegiatan pada **triwulan I** lebih difokuskan pada kegiatan yg bersifat persiapan dan kegiatan bersifat rutin sehingga serapan pada **Triwulan I** masih rendah. Namun untuk Triwulan berikutnya realisasi Anggaran dan Fisik akan meningkat sejalan dengan dimulainya kegiatan lainnya.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing-masing dari ke 4 indikator kerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk **sasaran SS1** yaitu *Meningkatnya Produksi Daging Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Produksi Daging Ternak (kg) rata-rata komoditas ternak, pada tahun 2017 (triwulan I) mencapai target kinerja sebesar **14,73%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi daging ternak secara kualitatif dan kuantitatif masih perlu ditingkatkan untuk triwulan berikutnya.
2. Untuk **sasaran SS2** yaitu *Meningkatnya Populasi Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Jumlah Populasi Ternak pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja rata-rata sebesar **117,36%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak, secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
3. Untuk **sasaran SS3** yaitu *Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan*, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2017 (Triwulan I) mencapai target kinerja sebesar **23,10%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan masih jauh dari target yg telah ditentukan, perlu peningkatan secara optimal untuk triwulan berikutnya.

4. Untuk **Sasaran SS4** yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Produktif*, dengan indikator 1 yaitu meningkatnya luas lahan produktif yg dikelola oleh masyarakat realisasi rata-rata sebesar 117,36%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan pengelolaan lahan produktif secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan dianggap Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.

Data Realisasi Keuangan dan Fisik untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 pada Triwulan I Rata-rata Realisasi keuangan dan fisik sebesar **8,69%** (*delapan koma enam puluh Sembilan persen*), masih rendahnya serapan anggaran dikarenakan oleh kegiatan pada Triwulan I lebih difokuskan pada kegiatan yg bersifat persiapan pelaksanaan kegiatan.

Berbagai kendala dan masalah yg dihadapi menjadi tolak ukur dalam pengambilan kebijakan untuk tahun masa yg datang.

Kuala Tungkal, 3 April 2017

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung jabung Barat



**Ir. Melani Bangun**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611215 199303 1 003